

Gabriela Akerina. Effectivity of Control Functional Inspectorat in Department National Education Sulawesi North Provincies. The guidance by J. Hanny Posumah and D. L. Tampongangoy

ABSTRACT

Education is one of Indonesia's development strategy are directed to build Indonesia. Implementation of government policies in education programs require Monitoring, Evaluation and Supervision. Therefore with the Implementation of a quality establishment of government officials, then appointed Inspectorate, as Supervision agency development, which serves to oversee the performance of the government on development activities, staffing activities, and service to the community.

The purpose of this study wanted to know how the Effectiveness of Functional Supervision Inspectorate on National Education Departements North Sulawesi. This study used qualitative methods. Study focused (1) the supervision process on the Character of Effectiveness is Productivity, Efficiency, Satisfaction, Flexibility, and Development. (2) Effective monitoring results, is the achievement of goal or program policies target that has been set. Source of data / informants interviewed as many as 13 people consisting of 1 people Head office, 1 Treasurer, 1 holders program, and 10 person staff, and process data collection using interview techniques.

The results showed that: in general, that functional supervision conducted by the Inspectorate to the National Education Departments North Sulawesi, seen from the 5 character of effectiveness is good. The timeliness in carrying out the task, achieve its intended purpose. In accordance with purpose of supervision. Their competence and results of monitoring that is capable of providing a change. Recommendations advice to the National Education Departements of North Sulawesi, leaders more confirms duties and functions of each fields. In order to better, structured, thorough and more appreciative of time in carrying out the task.

Keywords: *Functional Supervision Inspectorate*

PENDAHULUAN

Suatu proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Hakekat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksana tugas-tugas organisasi.

Sebagai bagian dari aktivitas dan tanggungjawab pimpinan, sasaran pengawasan adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas, dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pengawasan pada dasarnya adalah suatu tindakan menilai/menguji apakah sesuatu kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Menggunakan cara pengawasan tersebut akan dapat menemukan kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut berulang kembali.

Terlebih lagi dalam meningkatkan efisien dan efektifitas dalam pelaksanaan program pemerintahan

daerah, maka perlu partisipasi semua pihak di butuhkan bagi masyarakat, terlebih dari aparat pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini. Arah pendekatannya yaitu difokuskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya penyampaian kebijakan pemerintah pusat dan sekaligus sebagai pelaksanaan program pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu strategi pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia. Penyelenggaraan kebijakan pemerintah dalam program-program pendidikan diperlukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan manusia pelaksananya.

Oleh karena itu dengan pelaksanaan membentuk kualitas aparatur pemerintah, maka ditunjuklah inspektorat selaku badan pengawasan internal pemerintah, yang berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah, pada kegiatan pembangunan, kegiatan kepegawaian, dan pelayanan pada masyarakat. Agar terciptanya pemerintahan yang baik, dan bersih di daerah.

Hal ini di tandai oleh adanya tuntutan bagi masyarakat, akan menunjang terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan berlaku. Tuntutan bagi masyarakat itu timbul karena ada sebabnya, yaitu adanya praktek-praktek yang tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Penyimpangan-penyimpangan ataupun kelambatan-kelambatan yang terjadi dikalangan aparat pemerintah daerah, salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri. (Victor :1994, hal. 28).

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan harus ditingkatkan dengan lebih berhasil guna ke dalam tubuh aparatur pemerintah di dalam lingkungan masing-masing secara terus menerus dan menyeluruh. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 63 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Inspektorat

Provinsi Sulawesi Utara. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara adalah membantu Gubernur dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksana urusan pemerintah di daerah Kabupaten/Kota. Dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengawasan;
- e. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur.

Oleh karena itu, pengawasan baru bermakna manakala diikuti dengan dilakukan pengawasan, dengan langkah-langkah tindak lanjut yang nyata dan tepat. Dengan kata lain, tanpa tindak lanjut yang tepat waktu, pengawasan sama sekali tidak ada artinya. Pimpinan perlu melakukan pengawasan, sebab tanpa pengawasan akan mengakibatkan terjadi penyelewengan-penyelewengan. Oleh karena itulah perlu dilakukan pengawasan yang efektif khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas

pokok pemerintahan dan pembangunan, hal ini bertujuan untuk menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan untuk mewujudkannya maka perlu diterapkan pengawasan fungsional terhadap kinerja pemerintahan dan pembangunan.

Namun permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan belum dilakukan secara efektif, alasannya karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan, dimana dapat dilihat pelaksanaan pengawasan tidak tepat waktu hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam pemeriksaan dan selain itu dalam pemeriksaan belum dapat diputuskan bidang-bidang penyimpangan yang sering terjadi penyelewengan pemerintah, khususnya di Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan latar belakang dan pemikiran tersebut maka masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana efektivitas pengawasan fungsional pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara ? Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui efektivitas pengawasan fungsional Inspektorat pada Dinas

Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi, dan jenis data. Sesuai dengan fokus penelitian ini ialah Efektivitas Pengawasan Fungsional Inspektorat pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, maka penelitian ini lebih memungkinkan apabila tingkat eksplanasi menggunakan metode kualitatif. Mengapa demikian karena jenis penelitian ini yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivistik, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi, (Sugiyono : 2010).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong : 2006).

B. Definisi Operasional Fokus Penelitian

Konsep yang diteliti atau diamati dalam penelitian ini Efektivitas Pengawasan fungsional Inspektorat. Fokus penelitian tersebut secara konseptual didefinisikan sebagai “proses” dan “hasil” pelaksanaan Pengawasan Fungsional Inspektorat yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan definisi konsep tersebut maka ada dua hal yang merupakan fokus yang diamati dari Pengawasan Fungsional Inspektorat pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara yaitu proses pengawasan yang efektif, dan hasil pengawasan yang efektif, ialah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran kebijakan/program yang telah ditetapkan.

C. Jenis Data dan Informasi

Dalam penelitian kualitatif tidak terlalu mementingkan jumlah informan/responden, tetapi lebih mementingkan *content*, relevansi, sumber yang benar-benar dapat

memberikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa, atau hal. Oleh karena itu teknik pengambilan responden/informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik *purposive sampling* atau pengambilan sampel bertujuan.

Menurut ciri-ciri dari sampel bertujuan (*purposive sampling*) ialah sebagai berikut : (1) sampel tidak ditentukan atau ditarik terlebih dahulu; (2) tujuan memperoleh variasi sebanyak-banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan sampel seluruhnya dijaring dan dianalisis; (3) pada umumnya setiap sampel dapat sama kegunaannya; dan (4) pada sampel bertujuan seperti ini jumlah sampel ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Adapun yang menjadi responden/informan dari penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan : 1 orang Bendahara : 1 orang, Pegawai Pemegang Program 1 orang, staff pegawai : 10 orang.

D. Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Wawancara (Interview). Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer dari responden/informan. Wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dengan menggunakan

pedoman (*interview guide*), dan wawancara secara mendalam (*indepth interview*)

2. Dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang telah terolah atau tersedia
3. Observasi. Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena yang diteliti.

E. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka sesuai dengan penelitian ini teknik analisis data ialah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian analisis data deskriptif kualitatif berdasarkan pada tabel frekuensi yaitu hasil pengumpulan data direduksi. Istilah reduksi menurut (Moleong : 1989), dalam penelitian kualitatif ialah sebagai merangkum data, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting.

Langkah-langkah dalam analisis data yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hak-hak pokok yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

2. Penyajian data. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya, atau dilakukan penyajian data dengan teks yang bersifat naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi data gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang – remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Efektivitas Pengawasan Fungsional Inspektorat yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Dapat dijelaskan melalui 5 kriteria Efektivitas menurut Gibson (*Gibson, Ivancevic Donnelly 1996*), sebagai berikut yang kemudian disesuaikan dengan hasil wawancara.

A. Produktivitas

Produktivitas menggambarkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan kualitas output organisasi yang sesuai dengan

permintaan lingkungan. Dalam hal ini melihat pertimbangan antara hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat, dengan kualitas yang dimiliki oleh aparat pengawasan fungsional.

Dari hasil wawancara dan terjun lapangan langsung, rata-rata responden mengungkapkan bahwa Inspektorat memberikan pengawasan yang bermutu dan berkualitas melalui Aparat Pengawasan Fungsional yang di tugaskan untuk mengawasi. Instansi yang diperiksa, berusaha diarahkan untuk menjadi lebih baik dengan pengawasan yang handal sesuai dengan mutu dan kualitas dari Aparat pengawasan fungsional.

Dalam penelitian ini produktivitas pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Inspektorat, dengan kemampuan dan keterampilan aparat pengawasan fungsional dilihat dari hasil pengawasan yang dilakukan, aparat pengawasan fungsional Inspektorat mampu dalam melaksanakan tugas. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, bahwa kemampuan Aparat pengawasan fungsional yang banyak memberi masukan, perubahan, memperbaiki dan menilai kinerja pegawai Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Keterampilan aparat pengawasan fungsional, dengan pengalaman dan professional dalam

menyikapi suatu masalah. Terampil dalam mengawasi, teliti dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Sehingga Instansi yang diperiksa dalam penelitian ini, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Dapat memperbaiki kesalahan ataupun kekeliruan, program dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan Tugas dan fungsi masing-masing bidang. Pengawasan dapat berjalan dengan baik, karena adanya kerja sama dan komunikasi antar Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara dengan aparat pengawasan fungsional Inspektorat.

B. Efisiensi

Efisiensi, merupakan perbandingan keluaran dengan masukan. Ukuran efisiensi mengacu pada pembangunan sumber daya yang terbatas dalam prosesnya menjadi keluaran antara lain dinyatakan dalam keuntungan dari modal, biaya per unit, pemborosan, waktu yang terbuang, biaya rekanan dll.

Dalam penelitian ini, dengan hasil wawancara dan penelitian langsung. Efisiensi dalam penelitian merupakan perbandingan sumber daya dengan hasil akhirnya. Sumber daya yang dimiliki oleh Aparat Pengawasan Fungsional Inspektorat, dalam hal ini Sumber Daya Manusia di atas rata-rata dengan pendidikan dan pengalaman

yang sesuai dengan kriteria. Hasil akhir dari pengawasan yang dilaksanakan, sesuai dengan yang di rencanakan mampu menganalisis dan mengevaluasi keadaan lingkungan yang diperiksa. Pegawai yang diawasi dapat memahami dan memperbaiki apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam hal ini dengan adanya arahan dan kebijaksanaan dari aparat pengawasan fungsional, mampu diterima dengan baik oleh pihak Instansi yaitu Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini terlihat kualitas pekerjaan yang dihasilkan dapat mencapai harapan tanpa memerlukan pengorbanan yang besar, misalnya biaya, atau waktu yang terbuang sia-sia. Dilaksanakan dengan tidak menggunakan fasilitas ataupun peralatan yang maksimal, melainkan keterampilan dan kemampuan.

C. Kepuasan

Kepuasan dapat juga dilihat dari hasil prestasi kerja, prestasi kerja yang baik menghasilkan penghargaan yang lebih tinggi. Bila penghargaan tersebut dirasakan dan memadai, maka kepuasan kerja pegawai akan meningkat karena prestasi mereka, dan hal ini menimbulkan kepuasan tersendiri.

Dalam penelitian dengan wawancara dan terjun langsung lapangan, rata-rata informan mengatakan keberhasilan dari

pengawasan yang dilaksanakan, merupakan kepuasan tersendiri, baik pihak pengawas maupun pihak yang diawasi. hal ini dapat dirasakan dan dilihat dari hasil pengawasan yang dilaksanakan. Pihak yang diperiksa dapat dengan cepat menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan, ini menjadi kepuasan tersendiri bagi pegawai karena dapat memecahkan suatu masalah dengan bantuan dari aparat pengawasan fungsional. Sama seperti pihak yang mengawasi, aparat pengawasan fungsional dapat merasa puas dengan apa yang dikerjakan, bisa menyimpulkan, mengevaluasi, dan mengarahkan pekerjaan pegawai kearah yang lebih baik. Dengan hasil pengawasan yang dilakukan, pihak pengawas merasa ada kepuasan dalam melaksanakan tugas, dan dengan hasil pengawasan yang baik Inspektorat bisa mendapatkan penghargaan dari apa yang dikerjakan.

D. Fleksibilitas

Fleksibilitas yang menempatkan lingkungan sebagai faktor yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas organisasi. Karena organisasi dituntut untuk menyesuaikan baik dari intern maupun dari ekstern organisasi, demi keberhasilan dari efektivitas.

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan, dengan wawancara secara

langsung dengan responden. Kebanyakan responden mengatakan bahwa, aparat pengawasan fungsional Inspektorat mampu untuk menyesuaikan tugas-tugas yang diberikan, dalam melaksanakan pengawasan aparat pengawasan dapat menyesuaikan dengan keadaan lingkungan yang diawasi. Misalnya, aparat pengawasan fungsional berusaha memanfaatkan peluang-peluang untuk mendapatkan sumber dalam pelaksanaan tugas.

E. Perkembangan

Perkembangan merupakan suatu fase setelah kelangsungan hidup terus (*survive*) dalam jangka panjang. Itu organisasi harus bisa memperluas kemampuannya, sehingga bisa berkembang dengan baik dan sekaligus akan dapat fase kelangsungan hidupnya.

Sesuai penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, dengan wawancara dan penelitian langsung kepada responden yang ada. Sebagian besar mengatakan, dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional Inspektorat, bisa meningkatkan kualitas kerja pegawai menjadi lebih baik. Untuk dapat berkembang jauh lebih dari sebelumnya, hasil pengawasan dapat menjadi review kembali apa yang harus dikembangkan. Selain itu dengan kualitas yang

maksimal mampu menunjang efektivitas kerja yang lebih baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Efektivitas Pengawasan Fungsional Inspektorat yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sudah baik. Pernyataan tersebut dikarenakan dengan aparat pengawasan fungsional dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dalam jangka waktu tertentu, ketepatan waktu penyelesaian tugas yang efisien. Selain itu aparat pengawasan fungsional mampu menyesuaikan pekerjaan dan kondisi lingkungan, serta mampu berkembang dengan perubahan yang terjadi dari sebelumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini sebagaimana telah dideskripsikan dan dibahas di atas, maka dapat direkomendasikan hasil kesimpulan bahwa:

Efektivitas Pengawasan Fungsional Inspektorat pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sudah baik, dengan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan yang direncanakan. Mampu menyesuaikan lingkungan, mampu memberi kepuasan, dan mampu mengembangkan keadaan jauh lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka adapun saran – saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan agar pihak yang diawasi, yaitu Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi utara, pimpinan lebih menegaskan tugas dan fungsi masing-masing bidang agar program kerja dapat lebih baik dan tersusun dengan baik. Dan mengevaluasi kinerja dari bawahannya.
2. Disarankan pula untuk pegawai yang diperiksa, agar dapat lebih teliti dalam melakukan pekerjaan dibidang masing-masing, lebih menghargai waktu dalam melaksanakan tugas sehingga tidak terjadi kelambatan, memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari bidang masing-masing, misalnya dalam bidang keuangan, menyesuaikan pengeluaran dengan bukti-bukti fisik. Agar penyesuaian data lebih akurat dan dipertanggung jawabkan. Begitu juga dengan bidang kepegawaian, tidak menunda pekerjaan jika pekerjaan tersebut harus diselesaikan maka harus diselesaikan sesuai dengan yang ditetapkan. Dan juga bidang perencanaan pembangunan dan sarana prasarana, lebih fokus lagi dalam menyelesaikan program yang

sudah ada, menjalankannya sesuai dengan yang direncanakan dan tepat pada waktunya. Lebih disiplin dalam melaksanakan tugas, dan maksimal dalam mengerjakan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Gibson, James L, Ivancevic Donnely. 1996. *Organisasi: Perilaku, Struktur, dan Proses*. Jakarta, Binarupa Aksara
- Moleong, L, J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. RemajaRosdakarya.
- Sugiono, 2009, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Yogyakarta.

Sumber Lain :

<http://inspektorat.sulutprov.go.id/profil-5.html>

<https://aguspasawahan.wordpress.com/2011/02/01/efektivitas/>

